

MAMPU KITA

KABAR DARI KITA



KABAR DWI BULANAN PROGRAM MAMPU

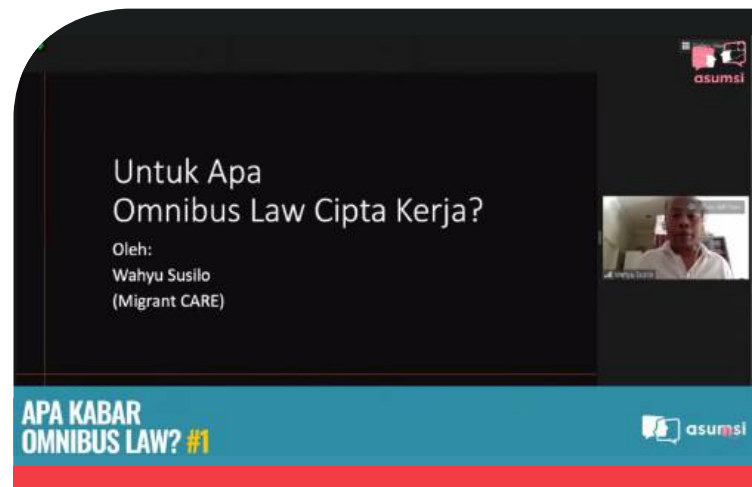
EDISI 15 / MEI – JUNI 2020

Mitra MAMPU Beri Rekomendasi bagi RUU Cipta Kerja

Sejak kemunculannya, Omnibus Law Ketenagakerjaan, yang biasa dirujuk RUU Cipta Kerja, mendapat sorotan publik cukup tajam, khususnya oleh para serikat buruh dan pekerja. Pembahasan RUU ini kian diperbincangkan terutama saat memasuki masa pandemi COVID-19 karena dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Guna mendorong usaha untuk menyejahterakan pekerja, memenuhi hak-hak yang berkeadilan dan mengarusutamakan gender, beberapa mitra MAMPU yang terdiri dari Migrant Care, Trade Union Rights Center (TURC), Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), dan Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA) menyerahkan rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk kluster ketenagakerjaan. Naskah DIM ini telah diserahkan oleh beberapa mitra MAMPU tersebut pada 20 Mei 2020 lalu kepada Panitia Kerja RUU Cipta Kerja.

“Di masa pandemi seperti ini, pekerja informal semakin rentan karena tidak tercakup dalam skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kerentanan yang lebih tinggi juga dialami oleh perempuan pekerja informal yang kerap “tersembunyi” dalam jangkauan pendataan dan cakupan jaminan tersebut,” ujar Wahyu Susilo dari Migrant Care pada webinar “Apa Kabar Omnibus Law: Rekomendasi Masyarakat Sipil bagi RUU Cipta Kerja dan Perlindungan Pekerja” yang diselenggarakan pada 25 Juni lalu.

RUU ini juga menuai pro dan kontra di tengah masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Bagi beberapa organisasi, peraturan ini dianggap abai terhadap kepentingan kaum perempuan, alias tidak berperspektif gender. Tiasri Wiandiani, Komisioner Komnas Perempuan 2019 – 2024 di kesempatan yang sama menjelaskan bahwa perlindungan terhadap maternitas melemah dalam RUU ini. “Sebagai contoh, dalam rancangan peraturan tersebut, perusahaan tidak berkewajiban membayar upah atas cuti haid. Omnibus Law ini juga hanya menetapkan upah minimum provinsi yang biasanya lebih rendah dari upah minimum kabupaten/ kota, sehingga berdampak pada penurunan upah pada perempuan yang bekerja di sektor padat karya,” jelas Tiasri. Sedangkan pada regulasi yang berlaku saat ini, upah cuti saat haid dijamin oleh UU Ketenagakerjaan no. 13/ 2003.



Hampir 60% angkatan kerja di Indonesia merupakan pekerja informal seperti pekerja rumah tangga, buruh lepas dan pekerja rumahan. Dalam paparannya di seri webinar kedua “Apa Kabar Omnibus Law” berjudul “Perempuan Pekerja dan Pelaku UMKM dalam RUU Cipta Kerja” yang dilaksanakan via aplikasi daring pada 27 Juni lalu, Andi Misbahul Pratiwi, Peneliti dari TURC menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja (Cipta Kerja) ini sangat mengancam perlindungan pekerja rumahan. “Menurut hasil pengamatan kami, terdapat dua pasal yakni 64 dan 65 dari RUU Cipta Kerja yang justru menghilangkan syarat-syarat mekanisme pekerjaan alih daya melalui perjanjian pemborongan kerja. Sistem kerja alih daya semakin masif dan tidak mengenal banyaknya satuan produk (seperti sistem borongan). Praktik kerja rumahan semakin masif terjadi, padahal dalam UU sebelumnya saja hak-hak pekerja rumahan belum terlindungi, apalagi dengan rancangan peraturan seperti ini,” jelas Andi.

Mengingat pro dan kontranya, saat ini pembahasan kluster ketenagakerjaan ditunda oleh Presiden Joko Widodo. Presiden mengatakan bahwa DPR dan pemerintah sepakat menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan agar dapat memperdalam substansi pasal per pasal. Ia juga mengatakan penundaan ini dilakukan untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dari para pemangku kepentingan.

Tetap Terampil untuk Bertahan Hidup

Pekerja rumahan sebagai bagian dari rantai pasok merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terkena dampak pandemi COVID-19. Tidak hanya turun, sebagian pekerja rumahan bahkan tidak memiliki penghasilan sama sekali karena tidak mendapat pesanan pekerjaan dari pemberi kerja. Beruntunglah serikat perempuan pekerja rumahan yang didampingi oleh salah satu mitra MAMPU yakni Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan



Indonesia (BITRA) di Desa Dagang Kelambir, Kabupaten Deli Serdang. Meski sebelumnya mereka belum pernah membuat masker, setelah memperoleh pelatihan dan melakukan uji-coba, mereka dapat memproduksi dan menjual masker kain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

“Sejak pabrik tidak lagi mendapat pesanan, saya juga tidak bekerja dan mendapatkan penghasilan. Namun, ketika kami mulai menjahit masker, perekonomian rumah tangga saya sangat terbantu,” jelas Mislam, perempuan pekerja rumahan yang selama 16 tahun terakhir membuat anyaman kawat untuk disetor ke pabrik maupun dijual langsung.

Saat ini ada 12 orang pekerja rumahan yang memproduksi masker kain. Meski baru mulai, masker dua lapis yang dijual seharga Rp 5.000 itu laris dipesan baik oleh BITRA maupun dari instansi pemerintah. “Sebenarnya masyarakat tidak mengharapkan pemerintah untuk menyediakan segala kebutuhannya, namun masyarakat perlu diberi pengetahuan dan keterampilan. Ketika perempuan ini terampil, mereka akan tetap bisa bertahan hidup,” jelas Rosmawati, Manajer Program Pemberdayaan Perempuan Pekerja Rumahan, BITRA.

Bantu masyarakat desa lawan dampak pandemi

Selain melakukan pendampingan untuk meningkatkan kondisi ekonomi perempuan pekerja rumahan, BITRA juga turut terlibat dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19. Mereka melakukan kegiatan Tanggap Darurat & Antisipasi Penyebaran COVID-19 melalui sosialisasi serta pembagian alat pelindung diri sederhana bagi masyarakat pedesaan. “Sasaran utama kegiatan emergency response ini adalah kelompok rentan di pedesaan, seperti kaum perempuan, lansia dan disabilitas. Selebihnya adalah petani dan masyarakat desa lain,” terang Rusdiana, Direktur Pelaksana BITRA Indonesia.

Tidak hanya melalui spanduk dan poster himbauan di desa-desa, BITRA juga melakukan sosialisasi terkait pencegahan virus

COVID-19 dengan memanfaatkan dialog interaktif radio komunitas dan mobil keliling. Di Desa Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagal misalnya, para relawan BITRA berkeliling dari satu desa ke desa lain menggunakan mobil untuk memberi informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat, termasuk himbauan hidup bersih serta menggunakan masker jika harus bepergian.

BITRA juga membagikan total 5.000 alat pelindung diri (APD) sederhana kepada desa dampingan yang tersebar di 9 kabupaten di Sumatera Utara. Paket yang berisi APD berupa masker juga dilengkapi dengan *hand sanitizer* dan jamu tradisional serta selebaran informasi mengenai COVID-19. “Ini kami lakukan karena ketika COVID-19 sudah masuk ke Indonesia, kami kesulitan mencari masker, *hand sanitizer* dan vitamin di daerah kami. Hal inilah yang kami lakukan untuk membantu pemerintah mengadakan barang-barang ini bagi masyarakat,” lanjut Rusdiana.

PEKKA Bantu Pemerintah Daerah Pantau Bansos di Masa COVID-19

Pada bulan Juni lalu, Mitra MAMPU, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) melakukan pemantauan bantuan sosial yang diberikan kepada warga terdampak COVID-19. Pemantauan tersebut dilakukan melalui survei yang melibatkan 6.553 responden yang tersebar di 91 desa di 42 kabupaten di 17 provinsi. Dua puluh dua kabupaten di antaranya merupakan kabupaten yang didukung oleh Program MAMPU.



Sebelum melakukan pemantauan, PEKKA juga melakukan pembekalan bagi enumerator pada 18 dan 19 Mei 2020 tentang tata-cara survei, pertanyaan, dan keselarasan pengumpulan data antar daerah.

Menurut Dwi Indah Wilujeng atau yang akrab disapa ‘Wilu’, Koordinator Program MAMPU PEKKA, pemantauan ini bertujuan untuk memastikan program Bantuan Sosial dari Pemerintah maupun dari sektor swasta yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran.

“Hasil pemantauan akan menjadi masukan bagi Pemerintah Desa dan Pusat untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial di masa pandemi COVID-19 ini,” ujar Wilu.

Pemantauan Bansos ini dibagi menjadi 2 jalur survei, yaitu:

1. Kuesioner Keluarga untuk Pemantauan Bansos COVID-19

Digunakan untuk mendapatkan informasi dari keluarga (masyarakat) yang mencakup tentang semua jenis program Bansos (baik dari Pemerintah Pusat, Daerah, Desa, Swasta, LSM, dsb) yang diterima/tidak diterima oleh masyarakat di masa pandemi.

2. Kuesioner Desa untuk Pemantauan BLT-DD

Digunakan untuk mendapatkan informasi dari aparat desa terkait dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Setelah semua data terkumpul dan dimasukkan oleh para enumerator, data-data tersebut kemudian diverifikasi oleh fasilitator lapangan, yang merupakan staf Serikat PEKKA di wilayah masing-masing, untuk kemudian diolah bersama dengan data dari daerah lain secara terpusat di Jakarta. "Pengumpulan data dilakukan sepanjang 21 Mei hingga 24 Juni. Pada bulan Mei dilakukan pengumpulan data untuk kuesioner keluarga, sedangkan bulan Juni lalu untuk kuesioner desa. Saat ini masih dalam proses pengolahan data untuk rekomendasi," jelas Wilu.

Para enumerator yang terlibat mengungkapkan bahwa pengumpulan data merupakan pengalaman yang sangat menarik dan menjadi pembelajaran yang berkontribusi penting dalam masa pandemi ini. Selain aktif membantu sesama warga, para enumerator juga turut merasakan manfaat dari penguatan kapasitas dari PEKKA, seperti yang disampaikan Asia, enumerator – anggota Serikat PEKKA di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

"Ya Allah, kita wawancara dengan Kades begitu cemasnya, namun dengan perasaan lega kami sudah selesaikan tugas tersebut. PEKKA membuat kami yang tadinya takut, menjadi berani," ungkap Asia se usai melakukan wawancara dengan Kepala Desa.

Beberapa enumerator menyampaikan bahwa masih terdapat warga yang tidak terdata dan tidak menerima bantuan sosial meskipun memenuhi kriteria penerima. Lismi, enumerator dari Ogan Kemerling Ilir, Sumatera Selatan, mengatakan, "Ibu Uliya, salah satu responden yang saya temui, dulu keluarganya pernah mendapat bantuan raskin, tetapi tanpa tahu apa sebabnya bantuan tersebut diputuskan. Karena tidak mengerti Ibu Uliya hanya diam." Saat ini hasil pendataan bantuan sosial COVID-19 masih dalam tahap pengolahan dan akan dipublikasikan dalam waktu dekat oleh Yayasan PEKKA.

HAPSARI Tetap Berikan Layanan Penanganan Kasus Secara Langsung di Tengah Pandemi



Kerentanan perempuan terhadap kekerasan, terutama KDRT, meningkat dalam masa pandemi COVID-19. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat selama periode 2 Maret - 25 April 2020, terdapat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa, dengan total korban 277 orang.

HAPSARI, salah satu Mitra MAMPU di Sumatera Utara yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan juga menerima peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi ini. Sepanjang bulan Januari hingga Desember 2019, HAPSARI menangani 73 kasus kekerasan, di masa pandemi Januari hingga Juni 2020 sudah ada 32 kasus kekerasan yang ditangani HAPSARI dan setiap harinya terus bertambah.

Banyak lembaga layanan yang melakukan penanganan kasus secara daring. Namun, HAPSARI tetap melakukan penanganan kasus secara langsung karena berbagai keterbatasan.

"Layanan daring kami berikan, tapi kami melihat jenis kasus dan kondisi korban itu sendiri. Tidak semua korban kekerasan yang kami dampingi bisa mengakses layanan daring. Keterbatasan jaringan internet, korban yang tidak mempunyai ponsel pintar, atau tidak bisa menggunakan ponsel, membuat kami harus tetap melakukan pendampingan tatap muka," ungkap Sri Rahayu divisi advokasi penghapusan kekerasan HAPSARI.

"Selain itu, dengan tatap muka dan memberikan pelukan, kami bisa memberikan rasa aman, nyaman dan kepercayaan kepada korban bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi permasalahannya," lanjut Ayu.

Untuk memastikan penanganan kasus terus berjalan lancar, HAPSARI mendiskusikan protokol penanganan kasus kekerasan dengan pemerintah desa setempat. Seperti yang dilakukan melalui diskusi dengan Kepala Desa Denai Kuala, Pantai Labu Deli Serdang. Protokol penanganan kasus yang disusun oleh HAPSARI yaitu, korban datang langsung ke posko HAPSARI lalu pengurus akan menggali informasi terkait kasus yang dilaporkan, kunjungan penguatan terhadap keluarga juga akan dilakukan jika diperlukan. HAPSARI akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, bhabinkamtibmas, babinsa, serta kepala dusun tempat kasus terjadi dan terus mendampingi agar korban dapat mengikuti proses hingga kasus selesai. Setelah itu, HAPSARI juga memfasilitasi layanan lanjutan seperti layanan penegakan hukum, psikolog, laporan ke Polres dan Pengadilan Negeri.

Tim HAPSARI siap memberikan layanan secara langsung dengan tetap menjaga jarak, memakai masker dan selalu menjaga kebersihan.

BaKTI Perkenalkan *Tools Monev SDGs* kepada Bappeda Kota Parepare



Pada tanggal 22-23 Juni 2020, BaKTI, Mitra MAMPU untuk sejumlah kegiatan di wilayah timur Indonesia memperkenalkan *tools Monitoring and Evaluation (monev)* Pencapaian SDGs kepada Bappeda Kota Parepare. Bertempat di Aula Kantor Walikota Parepare, BaKTI melakukan simulasi uji coba *tools monev SDGs* yang menggunakan 3 indikator utama yaitu responsif gender, transformatif dan inklusif.

Kegiatan diikuti oleh staf Bappeda, OPD (Dinas Kesehatan, Disdukcapil, P2TP2A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DP3A), BUMN (Pertamina), perbankan (Bank Sulselbar) serta lembaga non-pemerintah (Koalisi Perempuan Indonesia, 'Aisyiah, Yayasan Lembaga Pengembangan Ekonomi Masyarakat).

Tools Monev SDGs yang disusun bersama Program MAMPU tersebut, bertujuan untuk memberikan *tools* alternatif yang partisipatif yang sesuai prinsip *No One Left Behind* SDGs.

Percepatan Penanggulangan Stunting Masih Diperjuangkan di Masa Pandemi

Pandemi COVID-19 berdampak tidak hanya pada perekonomian masyarakat, namun juga pada upaya pencapaian prioritas nasional pemerintah, dimana salah satunya adalah percepatan pencegahan stunting. Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan 14 Mei 2020 lalu oleh 'Aisyiah, Mitra MAMPU pada klaster kesehatan



reproduksi dan gizi, ling Mursalin mewakili Tim Percepatan Penanggulangan Anak Kerdil (TP2AK) sebagai salah satu narasumber berpendapat, "Ketika kondisi normal saja target penurunan angka stunting cukup sukar dicapai, apalagi dalam kondisi kedaruratan COVID-19 seperti ini."

Menurut ling, terdapat empat faktor utama yang menghambat penurunan kasus stunting di berbagai wilayah, antara lain karena adanya realokasi anggaran dari yang semula dikonsentrasikan pada upaya pencegahan stunting, kini difokuskan pada upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19; pemberlakuan PSBB yang mengakibatkan terhentinya kegiatan posyandu, kelas ibu hamil, dan sosialisasi kesehatan reproduksi dan gizi; menurunnya aktivitas ekonomi yang mengakibatkan menurunkan pendapatan dan daya beli masyarakat; serta kelangkaan dan kenaikan harga pangan yang secara langsung mempengaruhi akses masyarakat terhadap bahan pangan bergizi

Melengkapi pernyataan tersebut, data menarik dari Bappenas yang disampaikan oleh Pungkas Bahjuri Ali menunjukkan bahwa wilayah yang menunjukkan angka kasus stunting tertinggi di Indonesia, juga merupakan wilayah dengan angka kasus COVID-19 yang tinggi. Kenyataan ini, menurut Pungkas mempersulit upaya pencegahan stunting. "Tantangannya bukan hanya *triple burden*, melainkan *quadruple burden*, yaitu beban obesitas, kekurangan gizi mikro, kekurangan gizi makro, ditambah lagi beban COVID-19."

Menanggapi hal tersebut, Dian Dhipo dari Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI menyampaikan pentingnya ketahanan pangan dan gizi di tingkat keluarga. "Ketahanan gizi yang lemah dalam lingkup keluarga akan meningkatkan masalah gizi akut. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya pula jumlah anak yang menderita gizi buruk dan stunting. Oleh karenanya perlu penanganan yang tepat, yaitu pendampingan di tingkat keluarga."

Penguatan Kader dan Pemberian Bibit untuk Ketahanan Pangan dan Gizi di Desa

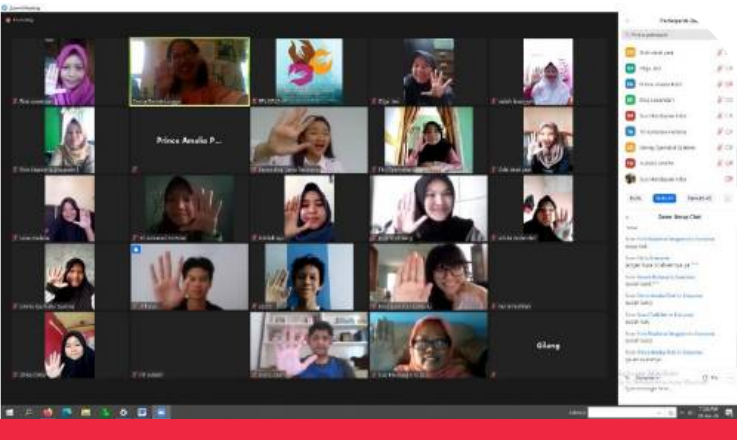
Pendampingan dan pendidikan di tingkat desa dilakukan oleh 'Aisyiah dengan dukungan Program MAMPU. Tri Hastuti, selaku Manager Program MAMPU 'Aisyiah menjelaskan di dalam sesi webinar tentang peran organisasi masyarakat sipil seperti 'Aisyiah dalam penguatan peran kader pendamping ASI dan gizi yang melakukan pendampingan keluarga dengan memberikan edukasi, serta bahan makanan pendamping ASI dari pangan lokal. Mendukung upaya tersebut, 'Aisyiah turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat *dhuafa mustadhafin* selama masa pandemi ini.

Pada 19 – 20 Mei 2020 lalu, melalui dukungan Program MAMPU, 'Aisyiah mengadakan penyegaran materi penyuluhan dampingan kepada para kader dan pendamping Pimpinan Daerah 'Aisyiah (PDA) di 15 kabupaten/kota. Pelatihan penyegaran ini dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom dan diikuti oleh 270 kader dan 30 orang pendamping PDA. Menurut Karwati, Koordinator MAMPU 'Aisyiah di Sumedang, para kader yang belum

terbiasa melakukan pertemuan virtual menunjukkan antusiasme tinggi. "Banyak kader bersemangat ikut, karena itu tim panitia siap membantu mengarahkan peserta untuk bergabung secara online", ujar Karwati.

Di samping penguatan kader, Tri juga menjelaskan peran 'Aisyiyah yang secara langsung terlibat dalam pengadaan bahan pangan yang sulit diperoleh di masa pandemi. Di beberapa kabupaten dan kota, "Aisyiyah menyalurkan bahan pangan bergizi kepada ibu hamil dan menyusui, dan anak dengan stunting sesuai dengan potensi daerah dengan memperhatikan kebutuhan khusus mereka. Selain itu, kami juga mendorong kelompok perempuan di daerah dampingan untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka," jelas Tri.

Yayasan PUPA Bengkulu: Bincang Anak tentang Mencegah Perkawinan Anak di Tengah Pandemi



Senin, 22 Juni 2020 lalu Yayasan PUPA Bengkulu—tergabung dalam jaringan Forum Pengada Layanan, Mitra MAMPU—mengadakan bincang-bincang virtual melalui platform Zoom. Acara bertajuk "Anak Bicara Perkawinan Anak" ini membahas peran generasi muda dalam mencegah perkawinan anak yang masih terjadi dalam masa pandemi COVID-19. Acara diisi oleh para pembicara muda yang mewakili Forum Anak Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) SMAN dan SMPN di Bengkulu, serta diramaikan oleh para panelis dari berbagai latar belakang.

Dalam diskusi yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tersebut, para pembicara menekankan pentingnya remaja untuk fokus pada upaya pencegahan dengan mengedukasi teman sebaya sedini mungkin. "Perkawinan anak melanggar hak anak," tutur Benedicta Vania Tandiono yang lebih akrab disapa 'Vania', Sekretaris Umum Forum Anak Provinsi Bengkulu. Menurutnya, anak remaja harus dapat berjuang untuk mendapatkan haknya menempuh pendidikan penuh dan mencapai cita-cita. "Kita dukung program pemerintah dan berharap untuk memaksimalkan regulasi yang sudah ada. Pada pembelajaran di sekolah, ada kurikulum tentang kesehatan reproduksi", ujarnya.

"Tak juga kalah penting, memperhatikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak, seperti keluarga yang kurang memberikan dukungan bagi anak, kurangnya muatan

Pemanfaatan pekarangan rumah warga yang dimaksud didukung dengan pemberian bibit tanaman dan ikan bagi komunitas Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA) di 15 kabupaten/kota. Pembudidayaan ikan dilakukan guna memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari secara mandiri, setidaknya selama masa pandemi ini berlangsung.

Monica Subastia dari tim MAMPU 'Aisyiyah Magelang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemetaan, masih banyak keluarga yang kekurangan konsumsi protein. "Pemberian bibit kami lakukan tidak terbatas pada bibit sayur, tetapi juga dari bibit buah dan ikan karena dari hasil pemetaan yang kami lakukan masih banyak keluarga yang kekurangan asupan protein dan juga kurang konsumsi buah," ungkapnya. Upaya ini disambut baik oleh kelompok BSA tiap daerah, yang menyampaikan harapan agar kegiatan ini berlanjut hingga pandemi ini berakhir.

pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, adanya budaya menikah di usia muda, dan tekanan sosial ekonomi seperti banyak kasus yang terjadi di Bengkulu Selatan," Olga Jeni Setiowati, pengurus PIK-R SMAN 02 menjelaskan bagaimana perkawinan anak di Bengkulu merupakan gejala sosial multifaktoral dari permasalahan sosial yang lebih besar seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan masyarakat. Menurut data yang disampaikan oleh Yayasan PUPA dan Cahaya Perempuan Women Crisis Center Bengkulu dalam kesempatan terpisah, prevalensi perkawinan anak di Provinsi Bengkulu tahun 2018 mencapai 16,17% dari total penduduk Bengkulu. Sementara, perkara dispensasi usia menikah di Bengkulu Selatan menunjukkan angka paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Bengkulu tahun 2018, yaitu sebanyak 94 perkawinan anak.

Riva Suwandari, pengurus PIK-R SMPN 13 Kota Bengkulu turut menambahkan bahwa perkawinan anak harus dicegah karena memiliki dampak berkepanjangan bagi anak. "Dari awal terjadinya, perkawinan anak sudah pasti akan memutus hak anak bersekolah dan bermain. Selanjutnya akan sangat mungkin terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena kondisi anak belum siap bertanggung jawab mengurus rumah tangga, apalagi dengan latar belakang ekonomi rendah," jelasnya.

Lantas apa yang anak muda dapat lakukan sebagai subjek utama permasalahan ini? Benedicta menjabarkan beberapa hal yang dapat dilakukan anak untuk ikut berperan mencegah masalah ini menjadi persoalan turun temurun, diantaranya:

1. Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dengan memanfaatkan masa PSBB di mana lebih banyak waktu dihabiskan bersama keluarga
2. Berdiskusi dengan teman sebaya yang memiliki pemahaman lebih baik terhadap isu remaja, seperti PIK-R dan Forum Anak Provinsi Bengkulu
3. Mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang mendukung pengembangan diri generasi muda yang berkemajuan dan produktif

Pencegahan dilakukan dengan dukungan dari pemerintah setempat, maupun sekolah sebagai institusi yang memiliki hubungan erat dengan anak, seperti:

- Tersedianya ruang aman sebagai forum belajar dan sumber informasi yang valid;
- Tersedianya bahan pembelajaran kesehatan seksual dan reproduksi yang menyeluruh di sekolah;
- Kebijakan yang memberikan sanksi tegas bagi pelaku perkawinan anak;
- Penguatan fungsi keluarga, yaitu fungsi perlindungan dan mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal

Perjuangan sejalan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu (Pergub) No. 33/2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Terbitnya peraturan tersebut pada Juli 2018 merupakan hasil dari

upaya advokasi bersama mitra MAMPU yaitu Cahaya Perempuan WCC, KPI Bengkulu dan PUPA Bengkulu bersama dengan PKBI Bengkulu, serta Pemda Bengkulu (DP3A PPKB Provinsi) di mana isu perkawinan anak dilihat sebagai isu strategis yang berkaitan erat dengan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSRR) perempuan yang berkontribusi terhadap Angka Kematian Ibu (AKI), stunting, angka kekerasan seksual dan KDRT.

“Saya mengajak teman-teman agar tak ragu untuk berani mengampanyekan pencegahan perkawinan anak. Tidak ada yang sia-sia, ketika kita menjadi agen pelopor kebaikan untuk masa depan kita semua,” tutup Vania.

Peran Perempuan Desa Sebagai Promotor Kesehatan di Masa Pandemi

Jelang paruh tahun dalam masa pandemi COVID-19, perjuangan masyarakat mencegah penularan penyakit tersebut tetap berjalan. Meskipun belum diketahui kapan pandemi ini dapat dikatakan berakhir, para anggota Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) terus berperan aktif memerangi penyakit yang diakibatkan virus corona baru ini melalui berbagai cara, seperti kisah berikut yang ditemui di sejumlah desa di Palembang.

Susilawati, anggota FKPAR, dalam kelompok Perempuan Mandiri dampingan Women Crisis Center (WCC) Palembang, jaringan PERMAMPU secara aktif mendorong upaya kelompoknya untuk mensosialisasikan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari rumah ke rumah. Hal yang ditekankan dalam sosialisasi di antaranya: selalu mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas di luar rumah dan sebelum makan atau menyentuh wajah, serta mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Penyuluhan tersebut diakhiri dengan pemberian masker kain, *hand sanitizer* dan *flyer* informasi pencegahan COVID-19 yang dibuat sendiri oleh para anggota kelompok dampingan.

Selain penyuluhan ke rumah-rumah, sejak awal diumumkannya COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat, Mitra MAMPU WCC Palembang juga mendampingi kelompok-kelompoknya untuk secara swadaya membuat fasilitas cuci tangan sederhana yang dilengkapi dengan sabun dan keran air bersih, serta melakukan disinfeksi secara rutin.

Rita Saparlasia, salah seorang anggota dampingan WCC Palembang di Desa Pedataran, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim ini menggiatkan kegiatan disinfeksi secara rutin di wilayah tinggalnya bersama dengan para penggiat lainnya.

“Kami secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan ke permukaan yang sering disentuh, seperti gagang pintu, keran air, dan sebagainya,” jelas Rita. Disinfektan yang dimaksud Rita diproduksi secara mandiri oleh warga desa sesuai dengan panduan yang dianjurkan oleh Kemenkes RI dalam Rangka Pencegahan Penularan COVID-19.

“Kegiatan pencegahan ini kami lakukan karena tidak mungkin tetap berdiam diri di rumah terus, sedangkan banyak kebutuhan keluarga yang tetap harus dipenuhi.”

Serangkaian kegiatan promosi kesehatan oleh kelompok perempuan akar rumput tersebut dilakukan dalam dampingan WCC Palembang. Yeni Izi, Direktur WCC Palembang, menyatakan besarnya peran perempuan akar rumput dalam pencegahan penyakit di desa.

“Kaum perempuan menjalankan peranan besar sebagai garda terdepan pencegahan COVID-19, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di desa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kehidupan masyarakat kembali berjalan baik dengan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat,” tukas Yeni.

Tentang MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap pelayanan dasar dan program pemerintah meningkat.

Informasi Lebih Lanjut:
Website: www.mampu.or.id
Twitter: @ProgramMAMPU
Email: info@mampu.or.id

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan